
Implementasi Manajemen Krisis Pariwisata Pasca Tsunami Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Brantas¹, Rifa Agustina Salsabila², Beta Budisetyorini³, Rachmat Syam⁴

Politeknik Pariwisata NHI Bandung

¹ Brantas.brants@yahoo.com, ² Rifagust24@gmail.com, ³ beta@stp-bandung.ac.id, ⁴ rat@stp-bandung.ac.id

Abstrak

Tanjung Lesung merupakan kawasan strategis pariwisata dan pada tahun 2015 resmi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Desa Tanjungjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten. Setelah mengalami bencana alam tsunami pada 22 Desember 2018, PT. Banten West Java Tourism Development terus melakukan upaya pemulihan dalam meningkatkan kembali pariwisata di Tanjung Lesung melalui implementasi program manajemen krisis pariwisata. Manajemen krisis digunakan oleh suatu organisasi sehubungan dengan suatu masalah yang berada di luar kendali. Manajemen krisis pariwisata terbagi menjadi enam tahapan yaitu, pre-event, prodromal, emergency, intermediate, recovery dan resolution. Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan enam tahapan manajemen krisis pariwisata saat setelah terjadinya tsunami. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan fenomena yang ada saat ini atau masa lampau. Hasil penelitian terdapat Enam tahapan manajemen krisis pariwisata di KEK Tanjung Lesung sudah menerapkan sistem peringatan dini, satgas bencana, SOP gempa bumi dan bencana, instruksi evakuasi, dan pembentukan tim tanggap darurat. Ada beberapa indikator yang belum diterapkan dan masih dalam proses perencanaan untuk meningkatkan tindakan enam tahapan manajemen krisis pariwisata di masa depan.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; Manajemen krisis pariwisata; Tsunami

Abstract

Tanjung Lesung is a strategic tourism area and, in 2015, was officially designated as a Tourism Special Economic Zone (SEZ) in Tanjungjaya Village, Panimbang Sub-District, Pandeglang Regency, Banten Province. After experiencing the tsunami natural disaster on December 22, 2018, PT Banten West Java Tourism Development continues to make recovery efforts to increase tourism in Tanjung Lesung through the implementation of a tourism crisis management program. Crisis management is used by an organization in connection with a problem that is out of control. Tourism crisis management is divided into six stages: pre-event, prodromal, emergency, intermediate, recovery, and resolution. The purpose of this study is to examine the implementation of the six stages of tourism crisis management in the aftermath of the tsunami. By using descriptive qualitative research methods, it explains phenomena that exist today or in the past. The results of the study found that the six stages of tourism crisis management in the Tanjung Lesung SEZ have implemented an early warning system, a disaster task force, earthquake and disaster SOPs, evacuation instructions, and the formation of an emergency response team. There are several indicators that have not been implemented and are still in the planning process to improve the actions of the six stages of tourism crisis management in the future.

Keywords: Tanjung Lesung Special Economic Zone; Tourism crisis management; Tsunami

Diterima:; Direvisi:; Disetujui:

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

PENDAHULUAN

Tanjung Lesung merupakan kawasan strategis pariwisata yang berlokasi di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu dengan statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang diresmikan dan telah beroperasi pada bulan Februari 2015, KEK Tanjung Lesung dikelola oleh PT. Banten West Java Tourism Development yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jababeka Tbk sebagai perusahaan pengembangan kawasan destinasi pariwisata bertaraf internasional.

KEK Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 Ha dengan garis pantai sepanjang 13 km yang menawarkan produk wisata bahari dan budaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke KEK Tanjung Lesung meningkat sampai dengan November 2018 mencapai 806.056 orang. Namun, pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam Tsunami Selat Sunda di Kawasan Tanjung Lesung dan sekitarnya. Oleh karena itu, PT. Banten West Java Tourism Development mengalami dampak penurunan kunjungan setelah terjadinya tsunami. Selain itu bencana alam Tsunami Tanjung Lesung juga memberikan dampak penurunan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat sekitar dan menimbulkan rasa trauma serta ketidakamanan untuk berwisata pasca tsunami. Adanya krisis yang diakibatkan bencana tsunami tersebut, maka peran PT. Banten West Java Tourism Development diperlukan untuk meningkatkan efektivitas strategi penanganan krisis pasca tsunami. Dalam penelitian ini akan dibahas sejauhmana pengelola PT. Banten West Java Development telah menerapkan program – program manajemen krisis pariwisata dalam upaya memulihkan kegiatan pariwisata menjadi normal kembali. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji implementasi enam tahapan manajemen krisis pariwisata yang diadopsi dari Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang manajemen krisis kepariwisataan dan modifikasi sesuai Faulkner (2001) dan Ritchie (2004) yaitu tahap pre-event, prodromal, emergency, intermediate, recovery dan resolution.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2019 tentang manajemen krisis kepariwisataan terdapat empat fase dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh faktor alam (bencana alam) yaitu fase kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Sedangkan menurut Faulkner (2001) dan Ritchie (2004) terdapat enam tahapan manajemen krisis pariwisata yang perlu dilakukan organisasi dan pengelola yaitu tahap pre-event, prodromal, emergency, intermediate, recovery dan resolution. Secara garis besar dari dua pendekatan manajemen krisis pariwisata tersebut memiliki langkah – langkah yang serupa dalam penerapannya dan telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan krisis pasca bencana alam di beberapa kawasan wisata yang terkena dampaknya. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi tahapan manajemen krisis pariwisata dari Permenpar No.10 Tahun 2019, Faulkner (2001), dan Ritchie (2004) sebagai konsep terapan untuk mengkaji kasus krisis pasca bencana alam Tsunami di KEK Tanjung Lesung yaitu tahap pre-event, tahap prodromal, tahap emergency, tahap intermediate, dan tahap long term (recovery), dan tahap resolution.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena penerapan manajemen krisis pariwisata pasca tsunami tahun 2018 yang dilakukan pengelola PT. Banten West Java Development saat ini untuk masa depan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2002) penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengamati suatu peristiwa dan perilaku yang didasari atas kondisi empiris dan dianalisis dengan pendekatan kajian literatur. Adapun teknik pengumpulan data primer menggunakan daftar periksa observasi lapangan dan pedoman wawancara semi terstruktur kepada pihak pengelola KEK Tanjung Lesung dan BPBD Kabupaten Pandeglang, serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan model Miles dan Huberman (Silalahi, 2010) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut pada tabel 2, matriks operasionalisasi variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Matriks Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<i>Pre - Event</i>	Rencana dan pengembangan strategi untuk pencegahan dan mitigasi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem peringatan dini 2. Pembentukan satgas bencana 3. Koordinasi antara layanan darurat dan otoritas pariwisata
<i>Prodormal</i>	Penanganan tanggap darurat sesegera mungkin untuk membatasi dampak bencana alam dan menghentikan krisis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan strategi komunikasi 2. Pengendalian krisis yang efektif 3. Mengendalikan atau mengalokasikan sumber daya untuk menangani insiden 4. Kerja sama dengan stakeholder utama di sektor pariwisata dengan industri lainnya
<i>Emergency</i>	Penanganan tanggap darurat akut untuk menyelamatkan seluruh sumber daya yang terkena dampak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan satgas bencana 2. Koordinasi yang disiapkan antara layanan darurat dan otoritas pariwisata 3. Penyediaan layanan dukungan bagi korban bencana dan untuk media
<i>Intermediate</i>	Pemulihan jangka menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dan pengendalian krisis 2. Struktur organisasi yang responsif 3. Pambangkitan sumber daya keuangan 4. Pemberdayaan karyawan
<i>Recovery</i>	Pemulihan jangka panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi strategi dan pengendalian strategis 2. Komunikasi dan pengendalian krisis 3. Manajemen sumber daya
<i>Resolution</i>	Normalisasi pasca krisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pencegahan dan perencanaan

Variabel	Definisi	Indikator
		2. Reinvestasi sumberdaya
		3. Perubahan struktur organisasi atau menciptakan tim manajemen krisis
		4. Membuat perubahan kebijakan
		5. Beradaptasi atau memodifikasi strategi yang tidak berjalan secara efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil reduksi data dan wawancara dengan pengelola PT. Banten West Java Tourism Development serta BPBD Kabupaten Pandeglang yang diolah berdasarkan indikator dari pendekatan enam tahap manajemen krisis pariwisata pasca tsunami sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi di KEK Tanjung Lesung, maka penerapan ke enam tahapan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Penerapan Tahap Pre-Event

Menurut hasil wawancara dengan General Manager dan Direktur Operasional PT. Banten West Java Tourism Development. Ketiga program dalam tahap *pre- event* ini sudah terlaksana serta sudah diterapkan dengan sangat bijak dan memang sudah terbentuk sebelum adanya bencana alam Tsunami Selat Sunda tahun 2018. Ketiga program tersebut antara lain yaitu:

a. Sistem peringatan dini

Di Tanjung Lesung terdapat 3 alat sistem peringatan dini yang sudah terpasang, dimana alat ini memiliki fungsi serta bentuk yang berbeda dan ditempatkan di titik-titik tertentu karena kegunaan fungsinya yang berbeda. Alat-alat sistem peringatan dini yang sudah terpasang antara lain yaitu:

1. Pendeteksi Tsunami WERA *Ocean Radar*

WERA *Ocean Radar* adalah sistem penginderaan jauh radar berbasis pantai dan menggunakan radar *over the horizon* teknologi untuk memantau arus permukaan laut, gelombang dan arah angin. WERA *Ocean Radar* mampu mendeteksi tsunami dalam waktu nyata dalam radius 200 km. Di Indonesia WERA *Ocean Radar* ini baru terdapat di 2 lokasi, Tanjung Lesung dan Kahai.

2. Sistem peringatan dini gempa EEWS

Jenis sistem peringatan dini gempa ini disebut EEWS atau *Earthquake Early System*. Sistem akan memberikan pesan peringatan lebih dini yaitu sekitar 15 sampai 30 detik, sebelum dirasakan guncangan gempa kuat melanda suatu kawasan. Peringatan dini gempa atau EEWS ini berfungsi sebagai sistem monitoring yang mendeteksi gempa bumi di hulu dan sistem pemrosesan data secara otomatis yang mengolah data secara cepat dalam hitungan detik. Titik lokasi pemasangan EEWS ini di Boutique Tanjung Lesung Beach Hotel.

3. Warning Receiver System (WRS)

WRS atau *Warning Receiver System* merupakan alat penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami berupa *smart display*. Dimana menjamin stakeholder menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk mengambil langkah penting selanjutnya. WRS ini terletak di Lobby Beach Hotel Tanjung Lesung.

b. Pembentukan satgas bencana

Pembentukan satgas bencana ini dilaksanakan ketika sedang ada event tertentu, ketika libur nasional, dan setiap weekend. Penyediaan pos siaga bencana dengan dukungan dari BMKG, BPBD kabupaten atau provinsi dan PUPR. Pembentukan satgas bencana ini otomatis terbentuk ketika adanya gempa bumi tidak berpotensi tsunami maupun berpotensi tsunami.

c. Koordinasi antara layanan darurat dan otoritas pariwisata.

Koordinasi antara layanan darurat dan otoritas pariwisata ini sudah terlaksana ketika pembentukan satgas bencana. Dalam satgas bencana banyak instansi pemerintah maupun swasta yang ikut terlibat untuk berkontribusi dalam bertugas ketika bencana terjadi. Tidak hanya itu media lokal maupun nasional ikut meliput perkembangan situasi dan kondisi untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di media sosial. BPBD sendiri memiliki koordinasi mengenai evakuasi dan juga penyelamatan ketika ada bencana alam dan tidak hanya tsunami saja.

Penerapan Tahap Prodromal

Tanjung Lesung mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) gempa bumi dan tsunami yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2019. Dimana pembuatan SOP ini mengacu kepada Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) BPBD Kabupaten Pandeglang yang berlandaskan dari Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021. SOP ini bertujuan sebagai pedoman dan pemahaman mengenai upaya-upaya mitigasi bencana, terselenggaranya mitigasi bencana secara terarah, terkoordinasi dan terpadu di kawasan pariwisata Tanjung Lesung.

Sebagai upaya mengurangi dampak atau resiko berupa kerusakan harta benda, korban jiwa dan kerusakan lingkungan, upaya penyadaran terhadap kepedulian menjaga lingkungan dan meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama setelah bencana, seperti komunikasi, transportasi, air minum dan listrik. Serta mewujudkan kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai tempat tujuan wisata dengan kondisi aman juga nyaman untuk dikunjungi. Dalam SOP ini dibahas mengenai tahap penanggulangan bencana yang terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu pra bencana, ketika bencana, dan pasca bencana. Selain itu adanya jalur evakuasi, titik rambu evakuasi kawasan Tanjung Lesung dan rambu evakuasi kawasan Tanjung Lesung. Juga adanya tempat pengungsian titik kumpul yang berlokasi di Kampung Cikadu Indah. Selain itu, adanya struktur organisasi tim tanggap darurat bencana.

Struktur organisasi ini merupakan penanggung jawab dari pembuatan SOP ini. Dimana unit kerja dalam tim mitigasi bencana ini memiliki tugas atau fungsi menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan badan atau institusi pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, seperti BMKG, BNPB, BPBD, BASARNAS, Kepolisian, TNI dan sebagainya. Sebagai pusat kendali kegawat darurat kawasan Tanjung Lesung. Bertindak sebagai penyebar luas informasi peringatan bencana, penyiapan jalur dan tempat evakuasi sementara. Kemudian tim pertolongan pertama ketika bencana, serta tim percepatan pemulihan bencana, pemulihan infrastruktur dan pemulihan jaringan utilitas.

Penerapan Tahap Emergency

Dalam tahap ini program yang dibentuk sudah terlebih dahulu dibentuk dalam tahap *pre-event* seperti pembentukan satgas bencana, kemudian koordinasi yang disiapkan antara layanan darurat dan otoritas pariwisata, dan penyedia layanan dukungan bagi korban bencana sudah sangat jelas di dalam struktur organisasi bahwa adanya tim yang berkoordinasi langsung dengan tim damkar, tim SAR, tim evakuasi, tim pemantauan dan

keamanan, tim kesehatan/P3K, logistik, peralatan, transportasi dan posko bantuan, serta tim pemulihan darurat sarana prasarana. Dalam SOP gempa bumi dan tsunami yang sudah dibuat di dalamnya terdapat prosedur pengevakasian seluruh individu yang ada di kawasan Tanjung Lesung ketika bencana terjadi yaitu gempa bumi yang berpotensi tsunami dalam situasi seperti apa kemudian tindakan diambil yang di dalamnya melibatkan peran tim tanggap darurat.

Tim tanggap darurat beserta seluruh pengunjung dan masyarakat Kawasan Tanjung Lesung pada saat merasakan guncangan gempa bumi yang cukup kuat. Segera memutuskan tindakan untuk menyelamatkan diri tidak perlu menunggu pesan peringatan dini BMKG sambil mengikuti instruksi dari tim tanggap darurat. Peran tim tanggap darurat dalam situasi ini antara lain yaitu:

- Mengupayakan tidak terjadi kepanikan pada penghuni ataupun pengunjung.
- Membimbing evakuasi dengan tertib terkendali dan aman.
- Membantu mobilitas evakuasi.
- Mendampingi ditempat titik kumpul sementara di Bukit Tanjung Lesung 1.
- Memastikan tidak ada penghuni pengunjung yang belum dievakuasi dengan melakukan patrol oleh tim keamanan & pemantauan di setiap tempat.
- Terus memantau perkembangan informasi dari BMKG dan tinjauan langsung lapangan pasang/surut air laut melalui pos-pos keamanan yang berada di area hotel, lalasa dan *sailing club* dan melaporkannya melalui radio HT kepada koordinator lapangan atau ketua tim tanggap darurat.
- Tim pemantauan dan keamanan menjaga asset atau barang perusahaan, penghuni atau pengunjung ketika ditinggal evakuasi sambil waspada dan memperhatikan keselamatan diri

Penerapan Tahap Intermediate

Fase *Intermediate* atau menengah ini merupakan tahapan ketika kebutuhan jangka pendek masyarakat harus ditangani, juga memulihkan utilitas dan layanan penting. Tujuannya saat ini adalah mengembalikan komunitas ke normalitas secepat mungkin. Program dalam tahap ini adalah komunikasi dan pengendalian krisis, struktur organisasi yang responsif, pembangkitan sumber daya keuangan dan pemberdayaan karyawan.

Penerapan Tahap Recovery

Rasa trauma akibat tsunami 22 Desember 2018 masih dirasakan oleh sebagian masyarakat dan pengunjung hingga saat ini. Menurut pihak PT. Banten West Java Tourism Development dengan adanya pemulihan jangka panjang dapat membuat seluruh pihak yang terkait dapat mengatasi rasa trauma. Selain *trauma healing*, pemulihan infrastruktur juga tetap dilaksanakan begitu pula dengan promosi untuk memulihkan kunjungan kembali. Dengan mengadakan testimoni dari pengunjung yang diunggah di media sosial guna menginformasikan bahwa berwisata kembali lagi ke Tanjung Lesung aman dengan pengelolaan dan tata kelola bencana yang sudah siap meminimalisir rasa kepanikan dan kekhawatiran yang ditimbulkan dari tsunami yang sudah terjadi. Dalam tahap ini program yang ada itu berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Seperti sosialisasi mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana serta trauma healing. Dimana sosialisasi ini bekerjasama dengan BMKG, BNPB, BPBD serta instansi terkait lainnya.

Penerapan Tahap Resolution

Pembentukan tim manajemen krisis ini dibentuk sebelum adanya bencana Tsunami Selat Sunda 2018 tetapi karena alat peringatan dini saat itu belum seanggih saat ini sehingga kejadian tsunami tidak sempat terdeteksi diawal. Selain itu kesiap siagaan dan

penanganan tanggap darurat pihak PT. Banten West Java Tourism Development belum sematang perencanaan yang telah disesuaikan setelah pasca bencana tsunami. Tim manajemen krisis merupakan karyawan yang juga bekerja di PT Banten West Java Tourism Development. Selain itu karena pada tsunami 2018 ini kesiapan terhadap lokasi evakuasi atau pengungsian sementara tidak memadai maka rencana kedepan pihak PT. Banten West Java Tourism Development ini ialah membuat tempat evakuasi sementara (TES) seperti yang ada di Kecamatan Labuan. Untuk saat ini tempat evakuasi sementara hanya ada di Bukit Tanjung Lesung 1 yang terletak 200m dari gerbang masuk Kawasan Tanjung Lesung. Pelatihan simulasi untuk menuju ke tempat evakuasi sementara tersebut sudah dilaksanakan oleh seluruh karyawan PT. Banten West Java Tourism Development.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan enam tahapan program manajemen krisis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dapat disimpulkan sudah sesuai dengan tahapan – tahapannya. Dalam penerapan tahap pertama pre-event, program sistem peringatan dini sudah dilengkapi dengan WERA Ocean Radar, Earthquake Early Warning System dan Warning Receiver System. Kemudian dalam penerapan tahap kedua *prodormal* manajemen krisis pariwisata di KEK Tanjung Lesung sudah mencakup faktor-faktor penerapan strategi komunikasi, pengendalian krisis yang efektif, pengendalian dan pengalokasian sumber daya untuk menangani insiden, dan kerja sama dengan stakeholder utama di sektor pariwisata dengan industri lainnya telah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) gempa bumi dan tsunami serta pembagian tugas dan fungsi sesuai unit kerja dalam struktur organisasi tim tanggap darurat. Selanjutnya, pada tahap ketiga emergency manajemen krisis pariwisata sudah ada perencanaan darurat terpadu dengan program pembentukan satgas bencana, koordinasi dengan layanan darurat dan otoritas pariwisata, penyediaan layanan dukungan bagi korban bencana serta media, serta petunjuk instruksi pengevakuasian dengan rambu – rambu jalur evakuasi di beberapa titik menuju Bukit Tanjung Lesung 1 sebagai tempat evakuasi sementara. Dalam penerapan tahap keempat *intermediate* manajemen krisis pariwisata yang bersifat jangka pendek, PT. Banten West Java Development juga sudah melakukan program komunikasi dan pengendalian krisis dan struktur organisasi yang responsif, pembangkitan sumber daya keuangan dan pemberdayaan karyawan melalui sosialisasi dan pelatihan. Kelima, dalam penerapan *recovery* manajemen krisis pariwisata yang bersifat jangka panjang juga sudah dilakukan melalui program evaluasi strategi, komunikasi dan pengendalian krisis, manajemen sumber daya strategis, kolaborasi stakeholder internal maupun eksternal dengan petunjuk teknis pelaksanaan tertuang di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) gempa bumi dan tsunami. Keenam, dalam penerapan *resolution* manajemen krisis pariwisata, kegiatan dan program strategi pencegahan dan perencanaan, reinvestasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan terkait bencana alam tsunami beradaptasi atau memodifikasi strategi yang tidak berjalan secara efektif masih dalam tahap proses pembangunan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaruh kesesuaian enam tahapan manajemen krisis pariwisata terhadap jenis bencana non alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti krisis ekonomi, sosial politik, dan teknologi.

BIBLIOGRAFI

- Anggarani, N. P., & Arida, N. S., 2018. Implementasi Manajemen Krisis Pariwisata Pada Kebun Raya Eka Karya Bali. p-ISSN: 2338-8811, e-ISSN: 2548-8937, 184.
- Ann, D., & Ritchie, B., 2007. Tourism Crisis Management and Organizational Learning. Article in Journal of Travel & Tourism Marketing · January 2007 DOI: 10.1300/J073v23n02_04, 45-50.
- Fauzi, E. N., Annisarizki, & Mardiana, S., 2021. Manajemen Krisis Satgas Penanggulangan Bencana PT. Banten West Java Tourism Development. Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2021 Vol. 02 (2), 76-95, 77.
- Hamudy, M. I., & Rifki, M. S., 2020. Tanjung Lesung Special Economic Zone: Expectation and Reality. Policy & Governance Review ISSN 2580-4820 Vol. 5, Issue 1, pp. 50-6, 65.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif., 2009. Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Kementerian Pariwisata., 2019. Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.
- Kyne, D., & Pathranarakul, P., 2006. An Integrated Approach to Natural Disaster Management: Public Project Management and its Critical Succes Factors . DOI: 10.1108/09653560610669882.
- Martens, H. M., Feldez, K., & Merten, P., 2007. Crisis Management in Tourism – A Literature Based Approach on the Proactive Prediction of a Crisis and the Implementation of Prevention Measures. Athens Journal of Tourism - Volume 3, Issue 2 – Pages 89-102, 89.
- OFFICE, C. C., 2017. Risk & Crisis Management in Tourism Sector: Recovery From Crisis in the OIC Member Countries. Turkey: COMCEC COORDINATION OFFICE.
- Ritchie, B. W., 2004. Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management. *Tourism Management* 25 (2004) 669–683, 674.
- Tseng, Y. P., & Petrick, J., 2007. Crisis Management Planning to Restore Tourism After Disasters. DOI: 10.1300/J073v23n02_16, 204.
- Wahyuningsih, S., 2013. Metode Penelitian Studi Kasus. Madura: UTM Press. Diakses dari <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
